

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

A. Standard Pelayanan Minimal dan Tujuan

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan yang meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, diimplementasikan dalam bentuk beberapa program aksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Penyelenggaraan SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting

ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah

dan menjamin ketersediaan pangan berjangka panjang sehingga harga stabil

dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan;
3. Bidang panganekaragaman dan keamanan pangan;
4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan. Tujuan penetapan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk :

1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal;
4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

Dari peraturan Menteri Pertanian No.65 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota

Tahun 2010, Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Sleman menggunakannya sebagai acuan sementara dalam pelaksanaan program-program ketahanan pangan, karena peraturan SPM kabupaten Sleman masih dalam tahap kajian DKP beserta perwakilan pusat. SPM yang digunakan untuk pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan

Ketersediaan pangan berfungsi untuk menjamin ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, dari segi kuantitas, kualitas dan keamanan. Ketersediaan pangan tidak hanya disiapkan oleh pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat dengan pengembangan lumbung pangan desa untuk menjaga ketersediaan pangan.

1.1. Indikator ketersediaan energi dan protein perkapita

- 1) Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - a) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota
 - b) Identifikasi/pengumpulan data
 - c) Koordinasi kesepakatan data
 - d) Penyusunan dan analisis data
 - e) Desain pemetaan ketersediaan pangan.

Pembuatan peta ketersediaan dan sentra produksi pangan akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ketahanan

perlu dilakukan beberapa hal seperti menyusun petunjuk operasional, indentifikasi masalah, penyusunan dan analisis data dan pembuatan peta. Namun karena kurangnya ketersediaan dana dan jumlah birokrat untuk mengumpulkan data Pemkab Sleman belum mampu melaksanakan tugas ini.

2) Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :

- a) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah
- b) Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM)
- c) Identifikasi/pengumpulan data
- d) Koordinasi kesepakatan data
- e) Penyusunan dan analisis data
- f) Desain pemetaan ketersediaan pangan.

Keberadaan pangan lokal sangat membantu dalam menjaga ketahanan pangan, karena selain menjadi variasi pangan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok seperti beras. Maka diperlukan adanya pembuatan peta kawasan produksi pangan lokal guna mengetahui kondisi lapangan tentang keberadaan pangan lokal. Dalam pembuatan peta ini, Pemkab Sleman masih mengalami kekurangan

- 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota.
- 4) Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, pemerintah perlu mengadakan suatu bentuk pelatihan dan pembinaan guna meningkatkan sumber daya manusia untuk memproduksi pangan lebih kreatif. Seperti untuk poin 3 dan 4, Pemkab Sleman sudah melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Sleman.

- 5) Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) ditingkat kabupaten/kota setiap tahun.

Dengan tujuan mengetahui tingkat konsumsi pangan masyarakat, oleh Pemkab Sleman melaksanakan melaksanakan 1 kali pada tahun 2011 dalam program pembuatan Neraca Pangan Daerah .

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

Pembkab Sleman sudah melaksanakan dalam monitoring dan evaluasi ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota untuk bahan data penyusunan kebijakan tahun

1.2. Indikator penguatan cadangan pangan

- 1) Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat.

Pemkab belum melaksanakannya karena hingga sekarang Pemkab Sleman dan Pemkab Provinsi serta dibantu oleh perwakilan dari DKP Pusat sedang merumuskan SPM untuk didaerah.

- 2) Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Agar Pemerintah lebih mengetahui tentang cadangan pangan yang ada, perlu diadakannya identifikasi cadangan pangan, dan Pemkab Sleman telah melakukannya dalam kurun waktu setiap tiga bulan sekali.

- 3) Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat.

Pemkab Sleman telah melakukannya pada tiap desa yang menjadi desa binaan untuk penyediaan pangan, karena tidak bisa memenuhi bila setiap desa mesti diadakannya kelembagaan pangan pemerintah desa.

- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat.

Dalam pembinaan dan pengembangan cadangan pangan pokok tingkat desa dengan membentuk lumbung pangan, Pemkab Sleman telah berhasil membina 15 desa sebagai lumbung pangan yang tersebar di

Lumbung Pangan Gemah Ripah dusun Kisik, Sedyo Simpen Minggir, Rukun Mandiri Minggir, Karya Manunggal dusun Pojok, Ngudi Rejeki dusun Pojok, Iso Makmur dusun Watugajah, Agung Sri Rahayu dusun Bontitan, Sejahtera dusun Brajan, Lumpang Kayu dusun Kliran, Migunani dusun Bekelan, Boga Pitoyo dusun Tengahan, Tani Maandiri dusun Tengahan, Lestari Mulyo dusun Dukuhan, Ngudi Makmur dusun Nanggulan, Pilar Boga Abadi Sejahtera dusun Jomboran.

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

Dalam program pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, perlu diadakanya monitoring dan evaluasi guna tetap mengetahui perkembangan yang ada serta melaporkan hasilnya ke Pemerintah daerah dalam setahun sekali.

2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan

Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah serta kualitas yang berkelanjutan, perlu adanya sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta menjaga harga tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

2.1 Indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

- 1) Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan

data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan

Untuk melakukan pengumpulan informasi mengenai harga, distribusi dan akses pangan Pemkab Sleman melakukannya tanpa adanya petugas khusus karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, sehingga Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan melakukan dengan melakukan observasi langsung.

- 2) Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan.

Untuk pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan perlu menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) agar kerja lebih mudah, namun hal ini belum bisa dilaksanakan oleh Pemkab Sleman karena tidak ada petugas khususnya.

- 3) Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi. Sudah dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data mengenai harga dan distribusi pangan.
- 4) Menyediakan informasi mencakup :
 - a) Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan)
 - b) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan)
 - c) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai

- d) Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan
- e) Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota
- f) Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

Semua program kerja telah direalisasikan kecuali program untuk menyediakan informasi mengenai kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan.

2.2. Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan

- 1) Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN.

Hal ini belum mampu dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah yang masih minim untuk menjalankan seluruh program ketahanan pangan.

- 2) Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi.

Bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan telah menyediakan panduan untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi harga namun belum menggunakannya sebagai cara pengambilan data dilapangan karena SDM yang masih terkendala.

- 3) Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar

Dalam pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan telah melakukannya dengan bekerja sama Dinas Pasar Sleman. Namun hanya dilaksanakan sebagian dari seluruh wilayah Kabupaten Sleman, Karena ketersediaan SDM dan dana yang masih kurang.

- 4) Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan
- 5) Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk :
merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - a) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat)
 - b) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh
 - c) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan
 - d) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan
 - e) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

Untuk program pada poin 4 dan 5 Bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan belum mampu melaksanakannya, karena sebagian besar dari pelaksanaan kerja masalah pasar masih banyak bekerja sama dengan Dinas Pasar Sleman sebagai pelaku utama.

3. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi berfungsi untuk mengarahkan masyarakat memanfaatkan

keamanan, dan kehalalan lewat pendidikan formal dan non formal. Pola konsumsi banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3.1 Indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1) Perencanaan Kegiatan

- a) Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) perkapita perhari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
- b) Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - i) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - ii) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.

Menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kualitas pangan masyarakat, akan membantu masyarakat mengetahui pola konsumsi yang sehat dengan memenuhi aspek mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan. Program ini telah direalisasikan dengan membuat diagram atau tabel konsumsi yang ideal. Namun untuk mengetahui pola konsumsi dan peta konsumsi masyarakat Sleman, Pemkab belum mampu melaksanakannya karena jumlah SDM dan keuangan daerah yang masih kekurangan.

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi

- i) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan
- ii) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :
 - (a) Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang
 - (b) Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah
 - (c) Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun
 - (d) Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
- iii) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi dan keanekaragaman masyarakat sangat penting untuk dilakukan, dengan menyusun petunjuk teknis operasional, mensosialisasikan penganeekaragaman konsumsi pangan serta melkukan pelatihan penyusunan analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan.

Dalam program ini, yang telah direalisasikan oleh Pemkab Sleman adalah program menyusun petunjuk teknis operasioanal penganeekaragaman konsumsi pangan pada masyarakat, serta mensosialisasikan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan Menyusun modul dan leaflet

pihak perhotelan, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk lebih mengenalkan pangan lokal pada setiap penyajian pangan, serta melakukan festival dan lomba makanan tradisional yang telah dilakukan dua kali dalam setahun. Namun untuk program Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan, belum terealisasi.

b) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :

- i) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
- ii) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
- iii) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
- iv) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
- v) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
- vi) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;

Pengembangan penganekaragaman bertujuan untuk

memanfaatkan pangan lokal untuk mengatasi ketergantungan terhadap

pangan pokok. Dalam rangka pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan, Pemkab mempunyai program pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan pangan penyuluhan dan tim penggerakan PKK, pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan, melakukan pembinaan pada warung sekolah, melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita tentang pangan beragam berbasis makanan lokal telah dilakukan oleh Pemkab Sleman. Sedangkan untuk program membuat gerai pengembangan pangan lokal 3b-beragam, bergizi seimbang belum terealisasi karena terkendala masalah dana yang ada.

c) Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan:

(pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan)

- i) Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan
- ii) Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan
- iii) Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan;
- iv) Evaluasi dan pelaporan

Dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan Pemkab mempunyai agenda pembinaan penganekaragaman, mensosialisasikan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat terutama kelompok

PKK dan lain-lain. Untuk evaluasi dan pelaporan Bidang

ketahanan pangan dan penyuluhan belum mampu melaksanakannya, sehingga hal ini juga mempengaruhi peneliti dalam mengumpulkan data yang lengkap.

- 3) Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi) Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala.

Pelaporan kegiatan baik monitoring dan evaluasi dalam kegiatan penganekaragaman pangan dan pola konsumsi, belum dilaksanakan oleh Bidang ketahanan pangan dan penulhan karena terkait dana dan jumlah SDM yang ada belum memenuhi.

3.2. Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

- 1) Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan
- 2) Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan
- 3) Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat
- 4) Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat

Menyusun petunjuk teknis operasional untuk mengumpulkan informasi tentang keamanan pangan, melakukan koordinasi peredaran bahan berbahaya dan analisis tentang mutu, gizi, keamanan produk pangan masyarakat dan melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat belum terealisasi meskipun sudah masuk dan SPM

ketahanan pangan karena keterbatasan dana sehingga Pemkab hanya bisa

melakukan berbagai program utama yang menjadi prioritas seperti program untuk produksi, distribusi dan konsumsi.

- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dengan :
 - a) Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar. Kegiatan ini belum dilaksanakan karena kegiatan dilaksanakan secara langsung melihat tempat produksi pangan di beberapa tempat.
 - b) Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar. Koordinasi masalah pasar dilakukan dengan bekerja sama Dinas Pasar Sleman sebagai pelu utama pengawasan pangan dan menjadi anggota DKP.
 - c) Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska). Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama DKP Provinsi, dengan melakukan seminar yang dilakukan ketika DKP provinsi melakukan kunjungan ke Sleman.
 - d) Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar. Program ini pun dilaksanakan dengan bekerja sama dengan DKP provinsi yang dilakukan beserta saat kunjungan kerja.
 - e) Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan. Sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh DKP Sleman dengan mengeluarkan sertifikasi

f) Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan saat penyusunan LAKIP pada tahun 2007.

- 6) Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar.

Dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah, tim dari DKP memberikan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan pendidikan kepada murid tentang pentingnya pola konsumsi yang berimbang dan keamanan pangan setiap tahun tiga kali.

- 7) Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan.

Saat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang menjadi perhatian tidak hanya murid dan guru namun juga kepada pedagang yang menjual makanan disekolah seperti kantin dan penjual asongan untuk diberikan penyuluhan tentang pentingnya keamanan pangan.

- 8) Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen. Telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan keamanan pangan kepada 10 pabrikan skala kecil pada tahun 2011.

- 9) Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR). Beserta dengan pembinaan tentang keamanan pangan Bidang

Ket... menghasilkan binaan tentang standar BMP

10) Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :

- a) Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota
- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten
- c) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan, dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan
- d) Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.

Dalam pengembangan sertifikasi produk pemerintah telah membentuk otoritas yang berkompeten, telah memberikan bimbingan dan pelatihan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta telah memperkuat kelembagaan yang mempunyai untuk otoritas sertifikasi produk.

11) Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota. Dalam hal ini bidang Ketapanglu bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menguji mutu dan keamanan pangan yang terealisasi satu kali pada tahun 2012.

12) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.

Sertifikasi dan pelabelan prima bertujuan untuk memberikan

informasi kepada konsumen tentang kualitas dan menjamin keamanan

terhadap hasil produksi olahan. Dalam sertifikasi dan pelebelaan, Pemkab bekerja sama dengan IKM, KIM dan pengusaha untuk mengoreksi dan memberikan sertifikasi halal kepada 3 pruduk pangan.

4. Pelayanan Penanganan dan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi dimana tidak tercukupinya pangan untuk memenuhi kebutuhan secara filosopi pertumbuhan dan kesehatan dalam kurun waktu tertentu yang dialami oleh suatu daerah, desa, atau rumah tangga. Kerawanan pangan ini dapat disebabkan karena, tidak ada akses secara ekonomi, tidak ada akses secara fisik, tidak tercukupinya pangan secara gizi dan jumlah pangan.

4.1. Indikator dan cara perhitungan capaian indikator penanganan daerah rawan pangan

- 1) Penyediaan data dan Informasi :
 - a) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
 - b) Melakukan pengumpulan data, mengolah, mengalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa.

Dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi kerawanan pangan, Pamkab mempunya tugas dan sudah dilaksanakan ialah melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis, sedangkan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa belum

4.1.1. Kerawanan pangan belum seluruh wilayah Kabupaten Sleman telah

terdata. Sedangkan untuk program FSVA Pemkab Sleman baru siap untuk menjalankannya pada tahun 2017 karena terkait penyiapan data dan sumber daya yang ada.

- 2) Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
 - a) Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi
 - b) Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
 - c) Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
 - d) Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif
 - e) Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih)
 - f) Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih)

Dalam pengembangan sistem kewaspadaan pangan, untuk kegiatan menyusun dan sosialisasi pedoman sistem kewaspadaan dan keamanan pangan telah terealisasi dengan melakukan pertemuan terhadap kelompok desa mandiri pangan dan kelompok lumbung pangan. Melakukan pelatihan petugas SKPG dan melakukan koordinasi SKPG kota juga terealisasi dengan baik, namun untuk pelatihan petugas FSVA belum dilaksanakan karena program FSVA baru akan direalisasikan tahun 2017. Sedangkan untuk menggerakkan tim pangan tingkat kecamatan dan kelompok PKK tingkat kecamatan belum dapat terealisasi selain karena belum terbentuknya unit di tiap daerah juga kesiapan dana yang ada belum mencukupi.

3) Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan

- a) Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
- b) Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
- c) Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
- d) Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
- e) Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.

Program penanganan daerah rawan pangan dapat melakukan dengan penyusunan dan sosialisasi pedoman umum penanggulangan kerawanan pangan, dan yang telah terealisasi adalah sosialisasi pedoman sedangkan untuk penyusunan pedoman belum terlaksana. Kegiatan untuk melakukan intervensi pada daerah bencana dengan memberikan bantuan sosial saat terjadi letusan gunung Merapi. Kegiatan untuk penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan, telah dilaksanakan pada 10 desa karena dana belum memungkinkan untuk melakukan pada seluruh wilayah.

4) Penanggulangan Rawan Pangan Kronis

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis

a) Investigasi

- i) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5
 - ii) orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
 - iii) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
 - iv) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - v) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
- Pelaksanaan investigasi hanya dilakukan oleh tim SKPG karena kepala daerah belum membuat tim investigasi khusus.

b) Intervensi

- I) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- II) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila

III) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.

IV) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan

V) kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya. Sedangkan untuk intervensi belum dilaksanakan karena belum ada tim investigasi khusus.

5) Penanggulangan Rawan Pangan Transien

a) Investigasi

i) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.

ii) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.

iii) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana wilayah yang mengalami rawan pangan masyarakat

sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.

- iv) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- v) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

b) Intervensi

- i) Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang.

Untuk penanggulangan rawan pangan transien bidang Ketapanglu belum melaksanakannya karena belum ada tin khusus dari daerah yang disediakan untuk menangani masalah rawan pangan. Dari keseluruhan program-program yang mesti dilaksanakan oleh DKP, masih banyak yang terbengkalai karena keterbatasan dana yang ada dan kekurangan SDM. Untuk mempermudah melihat hasil implementasi program

Tabel 3.18 : Realisasi Program SPM

No	Indikator program	Jenis Program	Pelaksanaan
1. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN			
1.1.	Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein PerKapita	Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan	Belum Terealisasi
		Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan	Belum Terealisasi
		Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota	Sudah terealisasi
		Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan	Sudah terealisasi
		Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun	Sudah terealisasi
		Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota	Sudah terealisasi
1.2.	Indikator Penguatan Cadangan Pangan	Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat	Belum Terealisasi
		Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Sudah terealisasi
		Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat	Sudah terealisasi
		Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat	Sudah terealisasi
		Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya	Sudah terealisasi
2. PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN			
2.1	Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses	Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan	Sudah terealisasi. Belum ada petugas khusus

	Pangan di Daerah	Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan	Belum Terealisasi
		Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportas	Sudah terealisasi.
		Menyediakan informasi mencakup : g) Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan); h) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan); i) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan); j) Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan; k) Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota; l) Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.	Sudah terealisasi. Kecualai menyediakan informasi Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan
2.2	Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN	Belum Terealisasi
		Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi	Sudah terealisasi.
		Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain	Sudah terealisasi. Hanya sebagian wilayah.
		Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan	Belum Terealisasi
		Melakukan koordinasi melalui forum	Belum Terealisasi

		<p>Dewan Ketahanan Pangan untuk : merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :</p> <p>f) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat)</p> <p>g) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh</p> <p>h) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan</p> <p>i) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan</p> <p>j) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

3.1	Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<p>Perencanaan Kegiatan</p> <p>c) Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten.</p> <p>d) Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :</p> <p>iii) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);</p> <p>iv) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan;</p>	Sudah terealisasi. Sebagian wilayah
		<p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>a. Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :</p> <p>i) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>ii) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :</p> <p>(e) Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;</p> <p>(f) Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;</p> <p>(g) Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan</p>	Sudah terealisasi. Kecualai Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.

		<p>elektronik minimal 12 kali dalam setahun;</p> <p>(h) Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.</p> <p>iii) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.</p>	
		<p>Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :</p> <p>i) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK</p> <p>ii) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen</p> <p>iii) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan local</p> <p>iv) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang</p> <p>v) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah)</p> <p>vi) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional</p>	<p>Sudah terealisasi. Kecuali Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional</p>
		<p>Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan: (pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan)</p> <p>v) Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan</p> <p>vi) Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>vii) Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>viii) Evaluasi dan pelaporan</p>	<p>Sudah terealisasi.</p>

		Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi) Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala	Belum Terealisasi
3.2	Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan	Belum Terealisasi
		Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan	Sudah terealisasi
		Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat	Belum Terealisasi
		Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat	Belum Terealisasi
		Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan : g) Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar; h) Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar; i) Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska); j) Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar; k) Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan; l) Evaluasi dan Pelaporan.	Sudah terealisasi. Kecuali menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar
		Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar	Sudah terealisasi.
		Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan	Sudah terealisasi.
		Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen	Sudah terealisasi.

	Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR)	Sudah terealisasi.
	Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain : e) Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota f) Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten; g) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan; h) Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.	Sudah terealisasi.
	Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota	Sudah terealisasi.
	Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota	Sudah terealisasi.

4. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

4.1	Indikator dan Cara Perhitungan Capaian Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan	<p>Penyediaan data dan Informasi :</p> <p>a) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa</p> <p>b) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa</p>	<p>Poin a Sudah terealisasi.</p> <p>Poin b Belum Terealisasi</p>
		<p>Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:</p> <p>g) Menyusun pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi</p> <p>h) Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi</p> <p>i) Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA</p>	<p>Sudah terealisasi.</p> <p>Kecuali Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih) Menggerakkan kelompok</p>

	<ul style="list-style-type: none"> j) Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif k) Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih) l) Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih); 	<p>PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih)</p>
	<p>Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan; g) Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan; h) Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana; i) Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan j) Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya. 	<p>Sudah terealisasi. Kecuali Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan</p>
	<p>Penanggulangan Rawan Pangan Kronis. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Investigasi <ul style="list-style-type: none"> i) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait. d) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis. e) Hasil investigasi digunakan oleh Tim 	<p>Belum Terealisasi</p>

		<p>Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.</p> <p>f) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.</p> <p>d) Intervensi</p> <p>a) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.</p> <p>b) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.</p> <p>c) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.</p> <p>d) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan</p> <p>e) kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.</p>	
		<p>Penanggulangan Rawan Pangan Transien</p> <p>a) Investigasi</p> <p>i) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.</p>	<p>Belum Terealisasi</p>

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (a) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk. (b) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi. (c) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien. (d) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat. <ul style="list-style-type: none"> b) Intervensi <ul style="list-style-type: none"> i) Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dari SPM yang ada, diharapkan pelaksanaan program akan lebih baik dan terarah, sehingga hasil dari implementasi kebijakan akan mudah terukur dan maksimal. Tahun 2011 merupakan waktu awal atau pertamakalinya SPM bidang ketahanan pangan mulai diimplementasikan oleh Pemkab Sleman. Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran serta masyarakat peduli pangan, pihak

Hasil Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan yang pertama kali diterapkan pada Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19 : Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011

Indikator	Pencapaian Tahun 2011 (%)	Target Tahun 2011 (%)	Realisasi (%)
Ketersediaan dan Cadangan Pangan			
Ketersediaan Energi per kapita (standar 2200)	134,77	130,00	103,67
Ketersediaan Protein per kapita (standar 57)	147,37	131,00	112,49
Penguatan cadangan pangan pemerintah (standar minimal 100 ton pangan setara beras)	19,00	20,00	95,00
Distribusi dan Akses Pangan			
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	60,00	65,00	92,31
Stabilitas harga dan pasokan pangan	58,00	60,00	96,67
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan			
Skor Pola Pangan Harapan	83,00	84,00	98,81
Pengawasan dan Pembinaan Keamananan Pangan	67,00	60,00	111,67
Penanganan Kerawanan Pangan			
Penanganan daerah rawan pangan	33,33	33,33	100,00

Sumber : LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2011

Dari tabel Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 di atas, terlihat bahwa kinerja dari birokrasi pada urusan wajib sudah mampu mencapai target, dengan hasil pencapaian rata-rata lebih dari 95% dari target yang telah ditentukan. Dari indikator ketersediaan dan cadangan pangan berdasarkan indikator SPM hanya target penguatan cangan pangan pemerintah yang belum mampu dipenuhi karena masalah pada dana yang masih minim dan pemerintah lebih mengutamakan ketersediaan cadangan pangan

Distribusi dan akses pangan dengan perhitungan ketersediaan informasi, banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya, dan sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan (lihat Lampiran) mendapatkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan program lain, karena hanya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang bisa mencapai target penuh. Hal ini disebabkan kurangnya SDM yang dibutuhkan untuk pengumpulan data, karena terkait dana yang ada tidak memungkinkan bila harus menambah SDM sebagai tim pengumpul data pada tingkat DKP. Sedangkan penanganan kerawanan pangan Pemkab Sleman telah berhasil melaksanakan implementasi kebijakan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Hasil dari implementasi program juga harus bisa memenuhi indikator-indikator ketahanan pangan yang sudah ada. Berikut adalah tabel kinerja pemerintah diukur berdasarkan indikator ketahanan pangan :

Tabel 3.20 : Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan

Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN					
Surplus beras (ton)	82.440	96.571	95.925	85.236	63.865
Produktivitas					
a. Padi sawah	57,17	62,14	60,87	59,53	56,93
b. Padi ladang	22,84	30,17	30,42	39,91	30,51
ASPEK DISTRIBUSI PANGAN					
Harga Beras di Kab. Sleman					
Harga tertinggi	5.342	5.133	5.383	7.117	7.775
Harga terendah	4.288	4.4004.	4.8755.	5.2446.	6.092
Rerata harga beras	4.748	748	097	102	6.933
ASPEK KONSUMSI PANGAN					
1. Konsumsi beras (kg/kapita/tahun)					
a. Nasional	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00
b. Kabupaten Sleman	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70
2. Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun)	13,97	14,56	14,45	16,29	19,16
3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	23,14	24,80	25,95	26,73	27,78
Kekurangan Energi Protein (KEP) %					
KEP < 15% = Resiko rawan pangan gizi ringan	10,96	11,66	10,85	10,85	8,77
5. Angka Kecukupan Gizi					
Energi (K. Kalori/kapita/hari) berdasarkan ketersediaan					
- Nasional	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Kab. Sleman	2.198	2.325	3.264	2.965	3.337

Sumber : LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2011

Ketahanan pangan mempunyai tiga aspek utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah, indikatornya ialah aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan dampak dari erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan banyak lahan pertanian rusak dan rusaknya tanaman pangan petani sehingga produktifitas

Kinerja Pemerintah pada aspek distribusi pangan atau menjaga stabilitas pasar dan harga pangan, Kabupaten Sleman mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2010 dengan harga 7,117 dari harga sebelumnya 5,383. Hal ini merupakan imbas dari inflasi tinggi akibat dari turunya perekonomian dunia terutama wilayah Eropa dan naiknya harga komoditi-komoditi utama seperti BBM, sehingga memberikan dampak langsung terhadap harga pangan yang ada. Kenaikan harga pangan juga tidak mampu diturunkan kembali pada tahun berikutnya, tahun 2011 harga pangan mencapai 7,775 dan tahun 2012 mencapai harga tertinggi 8,293.

Dari aspek konsumsi pangan, masyarakat kabupaten Sleman mengkonsumsi beras yang stabil dari tahun ketahun, namun meningkat untuk konsumsi protein hewani dan ikan. Untuk konsumsi protein hewani dari 16,29(kg/kapita/tahun) tahun 2010 menjadi 19,16 (kg/kapita/tahun) pada tahun 2011, dan untuk konsumsi protein ikan mencapai 26,73 (kg/kapita/tahun) tahun 2010 dan 27,78 (kg/kapita/tahun). Kenaikan konsumsi protein menjadikan tolak ukur keberhasilan program penganekaragaman pangan yang mengajak kepada masyarakat lebih memilih pangan berdasarkan kebutuhan Gizi. Peningkatan konsumsi protein

B. Sumberdaya

1. Sumber Daya Manusia

Birokrasi sebagai pelaksana dari suatu kebijakan haruslah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kualitas, dan kuantitas. Dari segi kuanlitas suatu birokrasi bisa dipandang dari tingkat jenjang pendidikan dan pengalaman yang telah ditempuh sehingga skil yang dimiliki mendukung untuk bidang yang di embanya. Karena kemampuan yang mereka punyai bisa menjadi modal utama implementator untuk memahami persoalan dilapangan maupun teknisnya, dan juga bisa mengembangkan kebijakan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Namun kualitas yang memadai tidak cukup untuk menjadi jaminan bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa diimbangi dengan jumlah pelaksana, karena begitu banyaknya tugas, luasnya wilayah dan keterbatasan waktu maka jumlah implementator sebagai eksekusi kebijakn juga perlu dipertimbangkan.

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sleman sebagai pelaksana dari program kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Sleman bila dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikan sudah bisa memadai untuk menguasai dan melaksanakan tugas-tugas yang ada. Tingkatan pendidikan dan pelatihan yang

Tabel 3.21 : Tingkat Pendidikan Aparatur Bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman

Nama	Jabatan	Ijasa	Diklat
Ir. Sunu Bejo Sihono	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	S-1 Pertanian- Ilmu Tanah	Diklat Pimpinan Tk.IV
Tri Mulyadi	Staf Seksi Ketersediaan Pangan	SLTA	
Agung Wibaya, SP	Staf Seksi Ketersediaan Pangan	S-1 Pertanian Agronomi	
Tri Aru Iraini	Staf Seksi Ketersediaan Pangan	SLTA	
Antonia Dharma Samudera Susilawati, SP	Kepala Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	S-1 Pertanian- Sosial Ekonomi Pertanian	Sistem Pengendalian Interen Pemerintah
Budiyanto	Staf Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	SLTA	
Tri Marhanto, SE	Staf Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	S-1 Manajemen	Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa
Esti Lestari, SST	Staf Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	D IV Penyuluhan Pertanian	Diklat Kepemimpinan
Watinem	Staf Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	SLTA	Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Dyah Kismarlina	Staf Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan	SLTA	Diklat Pengukuran dan Pemetaan
Wilyada Radianing, S.Pi. M.Si	Kepala Seksi Kelembagaan penyuluhan	S-1 administrasi publik	Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa
Paulus suprpto	Staf Seksi Kelembagaan penyuluhan	SLTA	
Wahyudi, S.ST	Staf Seksi Kelembagaan penyuluhan	D.IV kesejahteraan Sosial	Pelatihan Teknik Pembuatan Video
Sigit Nugroho, SP	Staf Seksi Kelembagaan penyuluhan	S-1 Pertanian- Budidaya Pertanian	
Anna Maria Sri Wijayanti, SP	Staf Seksi Kelembagaan penyuluhan	S-1 Teknologi Pertanian	
Imawan Nur Syaifuddin Ahmad, SP, M.E	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan	S-2 Magister Ekonomi Pembangunan	Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa
Rian Supriani, SP	Staf Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan	S-1 Pertanian Agronomi	Moven dan LAKIP
Tatiek Umiyarti	Staf Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan	S-1 Teknologi Perkebunan	Diklet Pengembangan Kelembagaan Sekitar Hutan

Jumlah aparatur Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ada 18 aparatur Tingkat Pendidikan dari kelulusan S-2 : 1 orang, S-1 : 9 orang, D.IV : 2 orang, dan SLTA : 6 orang.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bila SDM birokrasi Pemkab Sleman sudah mencukupi dari segi kualitas. Terlihat dari tingkat lulusan pendidikan sarjana dan diploma mencapai 66% atau berjumlah 12 orang dengan rincian lulusan S-2 jurusan Magister Ekonomi Pembangunan 1 orang, S-1 jurusan Pertanian-Ilmu Tanah, Pertanian Agronomi, Pertanian-Sosial Ekonomi Pertanian, Manajemen, administrasi public, Pertanian- Budidaya Pertanian, Teknologi Pertanian, Teknologi Perkebunan sebanyak 9 orang, dan D.IV jurusan Penyuluhan Pertanian, kesejahteraan Sosial berjumlah 2 orang. Jurusan yang diambil telah sesuai kebutuhan seperti jurusan pertanian untuk seksi ketersediaan pangan, jurusan ekonomi dan pertanian untuk seksi distribusi dan penganekaragaman pangan.

Untuk seksi penyuluhan diisi oleh orang-orang dari kelulusan pertanian, ekonomi, dan teknologi pertanian. Dari keseluruhan kelulusan rata-rata kelulusan jurusan pertanian, yang berarti telah sesuai dengan kebutuhan atau keberadaannya pada lembaga pertanian, sedangkan untuk kelulusan tingkat SLTA hanya 6 orang dan pernah mengikuti pelatihan Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Diklat Pengukuran dan Pemetaan. Para aparatur yang pernah mengikuti pelatihan ataupun diklat juga memiliki nilai tambah seorang aparatur terhadap kualitas suatu birokrasi karena sangat membantu pengetahuannya dalam wilayah teknis maupun teori untuk kemudian diimplementasikan kepada masyarakat.

Bila dari segi kuantitas penilainya dilihat dari jumlah birokrat yang ada

kuantitas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sleman masih mengalami kekurangan implementator tau tim lapangan. Kondisi birokrasi yang ada belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Miniman Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 untuk masalah penanganan kerawanan pangan dibutuhkan adanya tim investigasi dan pengumpul data yang berfungsi sebagai pencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk kemudian di olah menjadi rekomendasi untuk menangani daerah rawan pangan. Dikuatkan oleh data data dari hasil wawancara kepada kepala seksi ketersediaan pangan:

Kondisi birokrasi Belum mampu untuk terbentuknya kelompok kerja teknis ataupun ahli yang berfungsi sebagai tim investigasi karena terbatasnya biaya dari APBD. Namu kami tetap berusaha untuk selalu berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan³².

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan bisa mempengaruhi implementasi kebijakan dari tingkat keleluasaan implementator untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Karena melihat dari sisi sumber daya keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dari pelaksanaan suatu kebijakan, maka perlu dibutuhkannya pendanaan yang cukup untuk melaksanakn kebijakan. Sumber-sumber pendanaan tidak hanya serta merta dari daerah yang mempunyai tanggung jawab penuh, namun juga bisa dari sumber yang lainnya seperti dari APBN dan Investor .

Kabupaten Sleman mempunyai sumber daya keuangan yang masih banyak mengalami kekurangan, melihat kebutuhan dari kebutuhan pangan sangat besar sehingga dibutuhkan biaya yang besar pula untuk pelaksanaan program. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.285.019.000,00 dengan realisasi Rp2.994.819.704,00 atau 91,17%. Secara terperinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 3.22 : Anggaran dan Realisasi Program Ketahanan Pangan

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp580.631.000,00	Rp477.370.748,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp656.105.000,00	Rp622.477.656,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp510.528.000,00	Rp503.562.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan,	Rp300.000.000,00	Rp273.384.200,00
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp1.237.755.000,00	Rp1.118.025.100,00

Sumber : LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2011

Dana yang tertera pada tabel diatas merupakan dana dari APBD Kabupaten Sleman, meskipun Pemkab Sleman telah menurunkan dana untuk ketahanan panga mencapai Rp1.237.755.000,00 namun dana tersebut belum

telah dibuat oleh pusat. Untuk mengantisipasi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pemkab Sleman memilih-milih program yang sekiranya sangat urgen dalam langkah tercapainya ketahanan pangan. Hal ini juga menjadi alasan Pemda belum membuat SPM daerah karena dana yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program sangatlah besar. Berikut adalah hasil dari wawancara tentang SDA dan SDM yang dijelaskan dalam wawancara :

SDM yang ada secara kompetensi telah mencukupi karena pegawai disini telah lama mengurus masalah pangan, namun secara jumlah kita masih kurang kurang. Secara keuangan perlu tambahan dari APBN, karena keuangan dari daerah yang ditetapkan dalam APBD masih belum mencukupi.³³

Kekurangan dana untuk ketahanan pangan berdampak pada belum terealisasinya kegiatan untuk membuka warung yang menyediakan pengembangan penganekaragaman pangan, belum memenuhi cadangan pangan yang masih terealisasi 19 ton beras dari 20 ton beras target capaian Pemda, dan penyediaan SDM untuk tim pengumpul data pangan dan tim khusus untuk menangani daerah rawan pangan.

3. Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sleman meliputi sumberdaya alam non-hayati yaitu air, lahan, udara, dan mineral/bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu hutan, flora, dan fauna. Sumberdaya air di

Kabupaten Sleman terdiri dari air tanah dan air permukaan (sungai dan mata

lahan. Air diwilayah sleman sudah mencukupi untuk kebutuhan tanaman pangan, selain memiliki 154 mata air wilayah Kabupaten Sleman juga menjadi wilayah resapan air hujan untuk kebutuhan daerah Sleman dan sekitarnya. Untuk konservasi air, dan memperbesar tampungan air, Pemerintah Kabupaten Sleman membangun beberapa embung yaitu: Kemiri, Karanggeneng, Tambakboyo, Lampeyan, Gancangan, Krajan, Jering, Muncar, Agrowisata, Lembah UGM, Jurugan, Temuwuh dan Serut.

Keberadaan embung tersebut juga dapat dijadikan sumber air baku dan untuk irigasi pertanian. Selain embung untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sampai dengan akhir tahun 2009 telah dibangun 954 buah bendung teknis, 205 buah bendung setengah teknis, dan 923 buah bendung sederhana. Selain itu, terdapat pula 12 buah embung, 346,8 Km saluran irigasi primer, 421,4 Km saluran irigasi sekunder, 1.960,9 Km saluran tersier, 6,38 Km saluran pembuangan/ suplesi, dan 1.579 buah pintu air. Kondisi irigasi tingkat primer dan sekunder relatif bagus dan mencukupi untuk perairan, namun irigasi tingkat tersier dirasa masih kurang dari jumlah yang ada dan kondisi fisiknya yang masih banyak belum dilapisi beton sehingga pengairannya dirasa kurang optimal untuk mengairi sawah yang jauh dari wilayah embung pusat.

Sedangkan luas lahan sebagai penghasil pangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. Perkembangan penggunaan

rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas tegalan naik 0,01% dan untuk penggunaan lain-lain relatif. Penurunan lahan pertanian ini banyak diakibatkan oleh pengalih fungsian lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan dan gedung-gedung lainnya.

C. Aktifitas implementasi dan komunikasi

Dalam suatu aktifitas implementasi, dibutuhkan adanya pola koordinasi dan komunikasi sebagai dasar pembangunan pemahaman dan pola kerjasama agar suatu kebijakn bisa berjalan efektif, maka sangatlah penting terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi dengan baik agar tidak terjadi perbedaan pendapat terhadap kebijakan. Dalam pola komunikasi kebijakan, sosialisasi sebagai salah satu aspek untuk menjalin pemahaman bersama, selain antar intansi pemerintahan juga terhadap masyarakat, supaya masyarakat umum sebagai objek dari proses implementasi kebijakan dapat mengetahui apa saja isi dari kebijakan, dan mengetahui peranan masyarakat dalam kebijakan dan pada tingkatan intansi pemerintahan tidak ada perbedaan pendapat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti sosialisasi membuat seminar, diskusi publik, dan media baik cetak maupun elektronik sebagai media untuk menyebarkan berita.

Jalanan koordinasi antar birokrasi dan staf untuk agar kebijakan tersebut tidak mengalami kontradiksi dikarenakan pemahaman yang dimiliki antar instansi berbeda-beda dan terjalin hubungan kerja yang baik. Oleh karena itu koordinasi antar instansi dan para staf yang terkait sangat penting. Saat ini koordinasi sudah berjalan dengan hasil para staf sudah memahami isi kebijakan dan tugasnya

sebagai implementator, sedangkan untuk instansi lain yang terkait masih dalam dalam tahap sosialisasi. Seperti yang dijelaskan oleh ketua seksi ketersediaan pangan dalam wawancara :

Semua para staf sudah memahami tentang kebijakan yang ada, sedangkan untuk birokrasi yang lain masih dalam tahap koordinasi dan pemahaman bersama³⁴.

Dalam pola komunikasi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sleman menggunakan media elektronik dengan membuat webside sendiri yaitu *pertanian.slemankab.com* untuk menyebarkan informasi yang ada dan dengan memanfaatkan kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan, karena kurangnya ketersediaan dana yang mengharuskan pemerintah untuk kreatif dalam menjalankan fungsinya agar tidak mengurangi program kerja yang ada. Dari jawaban dari hasil wawancara tentang cara sosialisasi kebijakan :

“komunikasi dalam bentuk sosialisasi program dilakukan dengan memanfaatkan pada setiap kesempatan yang ada, seperti pada saat rapat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau pada saat kegiatan program yang melibatkan birokrasi dan mesyarakat³⁵.”

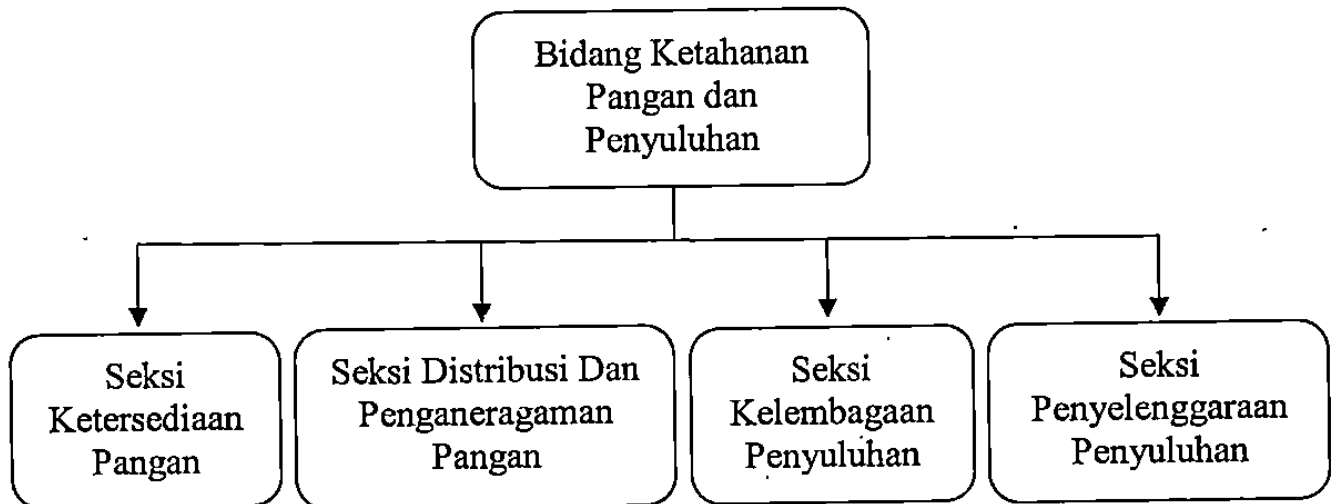
D. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator

Sebagai eksekutor kebijakan program ketahanan pangan, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, perlu memiliki karakteristik dan kondisi yang memadai agar implementasi program bisa berjalan dengan maksimal. Kondisi implementator bisa dilihat dari kondisi struktur birokrasi yang ada karena harus menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada dan keadaan dari sumberdaya manusia yang

³⁴ Ibid

telah ada. Berikut adalah struktur Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan :

Gambar 3.6 : Struktur Bidang Tetahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan.



Sumber : Bidang Tetahanan Pangan dan Penyuluhan Dinan Pertanian dan perikanan dan kehutanan.

Struktur birokrasi yang ada saat ini telah merangkum semua tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dasar pada bidang ketersediaan dan cadangan pangan, bidang distribusi dan akses pangan, bidang penganekaragaman dan keamanan pangan, bidang penanganan kerawanan pangan. Sedangkan keadaan sumberdaya manusianya telah dipaparkan sebelumnya.

Karakteristik dari agen pelaksana bisa dilihat seberapa jauh konsistensinya dalam menjalankan kebijakan. Karena konsistensi akan berpengaruh terhadap perkembangan dari kinerja untuk menghasilkan suatu kebijakan yang bernilai bagi perkembangan daerah. Birokrasi Bidang Ketahanan Pangan Sleman dalam menjalankan progrsm dari Dewan Ketahanan Pangan masih tetap menjaga konsistensinya, seperti yang dijelaskan dalam wawancara :

Birokrasi Bidang Ketahanan Pangan Selalu berusaha untuk

E. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

1. Kondisi Ekonomi

Ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 mampu mendukung ketersediaan pangan melalui produksi tanaman pangan berupa padi sebanyak 269.404 ton dan beras sebanyak 167.385,83 ton. Serta mengalami surplus beras sebesar 96.571 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY. Dalam meningkatkan pemberdayaan petani dan kelompok tani diberikan dana penguatan modal sebesar Rp13.068.725.600 dan dilakukan pengukuhan kembali kelompok petani yang eksis dan dinamis sebanyak 616 kelompok. Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Sleman adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata meliputi wisata alam, wisata candi, museum, wisata olahraga, wisata pendidikan dan wisata budaya, dan wisata agro.

Pengaruh dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan dana cukup besar. Secara ekonomi meskipun kabupaten sleman mengalami peningkatan, namun dana untuk implementasi kebijakan ketahanan pangan masih membutuhkan keuangan yang lebih untuk menjalankan semua program yang telah di siapkan, karena dana dari APBD saja tidak mampu menutupi semua kebutuhan. Seperti yang ada dalam penjabaran SPM banyak program kegiatan yang mesih belum dilaksanakan karena dana yang ada tidak mencukupi, oleh karena itu dana

2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial pada suatu daerah bisa dilihat dari angka kemiskinan, tingkat pendidikan atau tingkat pembangunan manusia. Jumlah keluarga miskin pada tahun 2005 sebanyak 60.736 KK dan meningkat menjadi 62.518 KK pada tahun 2006, namun pada tahun 2007 terjadi penurunan jumlah keluarga miskin yaitu sebanyak 58.761 KK dan kembali menurun menjadi sebanyak 56.867 KK pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 65.157 KK, terjadinya peningkatan tersebut karena dilakukan pendataan ulang KK miskin. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 600.626 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 557.441 orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak 43.185 orang. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2011 adalah 0,93.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pendidikan dari masa kanak-kanak sampai ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan pendidikan merupakan investasi ke depan untuk masa yang lebih baik. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan baik dalam kuantitas maupun kualitas tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih dijumpai dalam mengakses pendidikan

berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Pembangunan manusia difokuskan pada upaya memberdayakan penduduk sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumahtangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia.

Dalam kurun lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Sleman selalu meningkat. IPM Kabupaten Sleman meningkat dari 75,57 pada tahun 2005 menjadi 77,63 pada tahun 2009 (angka sementara), atau meningkat rata sebesar 0,51% persen per tahun. Kenaikan ini terjadi pada komponen pembentuk IPM, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi riil perkapita, meningkat masing-masing 0,525 tahun; 0,372%; 0 tahun dan Rp1700 pertahun selama periode 2005-2009.

Dalam perbandingan antar kabupaten/kota se Indonesia, pada tahun 2007, IPM Kabupaten Sleman menduduki peringkat 15 dari 456 Kabupaten/Kota di Indonesia, yang berarti naik dua tingkat dibanding tahun sebelumnya yang berada diposisi 17 dan sekaligus menempati posisi pertama diantara 363 Kabupaten di Indonesia. Posisi IPM sebesar 76,70 berada dibawah

nasional pada tahun 2007 dengan nilai IPM sebesar 78,14. Sedangkan pada tahun 2008 IPM Kabupaten Sleman menempati peringkat 15 dari 477 kabupaten/kota. Hal ini menyiratkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi sosial suatu daerah bisa berpengaruh terhadap aktifitas implementasi kebijakan yang menjadi faktor penghambat ataupun juga bisa menjadi faktor pendukung dari suatu aktifitas implementasi kebijakan. Kondisi sosial bisa menjadi faktor penghambat bila kesejahteraan masyarakat rendah karena keleluasaan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakn lebih terbatas, dan pembangunan masyarakat yang rendah juga akan menjadi faktor penghambat karena sedikitnya SDM yang bisa ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan bila kondisi sosial dari tingkat kemiskinan rendah dan pembangunan manusia yang tinggi, bisa menjadi faktor pendukung dari proses implementasi kebijakan. Di Kabupaten Sleman kondisi sosialnya relatif dalam kondisi yang baik, dari tingkat kemiskinan yang rendah dan pembangunan manusia yang tinggi sehingga tidak menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

3. Kondisi Politik

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban politik dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi

seluruh komponen masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung serta pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan pelaksanaan pemilukada.

Kondisi politik di Kabupaten Sleman relatif dinamis tanpa ada kekerasan atau kerusuhan yang diakibatkan oleh pertarungan politik ataupun masalah SARA yang biasanya menjadi masalah dalam kerusuhan horisontal antar warga. Dalam urusan perpolitikan, masyarakat masih memiliki kedewasaan politik dalam memnghadapi lawan politik atau menerima kekalahan, dilihat dari tidak ada kerusuhan saat terjadi pesta demokrasi untuk memilih pejabat publik. Untuk masalah kebijakan ketahanan pangan, masyarakat ataupun kelompok-kelompok kepentingan tidak memiliki respon negatif atau penolakan terhadap isi kebijakan yang ada, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak memiliki kendala dalam masalah politik yang ada.

Kebijakan ketahanan pangan bisa berpengaruh terhadap kondisi politik di Kabupaten Sleman, bila Pemkeb Sleman mampu menjamin kebutuhan pangan akan berdampak positif terhadap elektabilitas politik yang ada karena ketahanan pangan berpengaruh terhadap politik .Secara umum kondisi

melaksanakan program kebijakan yang telah dirancang. Seperti yang diutarakan dalam data wawancara berikut :

Secara umum kondisi masyarakat dan kelompok kepentingan kabupaten sleman menerima semua program dari pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan ketahanan pangan.³⁷

F. Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana/implementator

Keberadaan suatu kebijakan yang ada tidak serta merta bisa diterima langsung oleh para birokrat, terlebih kebijakn tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Namun tidak hanya karena ketidak sesuaian yang menyebabkan tidak diterimanya suatu kebijakan, pendapat atau pemahaman isi yang keliru dan pemahaman nilai kebijakan juga bisa menyebabkan suatu kebijakan bisa berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu kebijakan terhadap para birokrat. Sikap-sikap tentang respon, pemahaman isi, dan perferensi nial suatu kebijakan dapat berpengaruh terhadap aktifitas implementasi yang dilakukan oleh para implementator, karena menganggap penting atau perlunya suatu kebijakan bisa mempengaruhi semangat dan keinginan para birokrat dalam melaksanakan kebijakan. Data kecenderungan pelaksana dapat dilihat dari hasil wawan cara berikut :

Selama ini pemerintah daerah mempunyai respon yang bagus terhadap kebijakan program ketahanan pangan dan semua staf memahami isi kebijakn serta tujuan dari kebijakan tersebut. Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan mengoptimalkan dana yang ada³⁸.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

Pemkab Sleman terutama Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai respon yang positif terhadap keberadaan kebijakan ketahanan pangan yang dirumuskan oleh DKP Sleman dengan melaksanakan kebijakan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah. Respon yang baik tersebut juga dapat dinilai dari kinerja sosialisasi yang meskipun dengan dana kurang memadai tetap bisa melaksanakannya lewat menyelipkan program pada agenda lain yang langsung berinteraksi kepada masyarakat dan birokrasi pemerintahan Sleman, dan dalam pengumpulan data untuk distribusi, harga dan wilayah serta pola konsumsi masyarakat Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tetap melaksanakan kegiatan meskipun tanpa ada tim pencari data yang sesuai dengan peraturan SPM.

Sedangkan pemahaman tentang isi kebijakan pangan, para Birokrat Bidang Ketahanan Pangan sebagai eksekutornya sudah memahami semua isi kebijakan, serta memiliki perfensi nilai yang bagus terhadap isi kebijakn karena memandang bahwa masalah pangan adalah masalah utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh daerahs sebab setiap masyarakat membutuhkan pangan. Meskipun untuk SPM hingga tahun 2013 masih dalam tahap perumusan untuk menyesuaikan perhitungan antara pusat dengan menyesuaikan keadaan daerah,